

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA HIBURAN MALAM ORGAN TUNGGAL (Studi Pada Polres Lampung Selatan)

**Oleh
Syukron Ginta Kesuma**

Tindak pidana pembunuhan dalam hiburan organ tunggal merupakan pelanggaran hukum serius yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas oleh aparat. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN Kla, dimana terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan terdakwa II 2 tahun 10 bulan, dan pada Putusan Nomor: 353/Pid.B/2023/PN Kla, di mana terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan terdakwa II selama 1 tahun 10 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan organ tunggal dan apa saja faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber, termasuk Penyidik Kepolisian Resor Lampung Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada hiburan organ tunggal dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Proses tersebut meliputi penyidikan oleh kepolisian yang disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, serta penjatuhan pidana oleh majelis hakim. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi: Faktor undang-undang yaitu adanya tantangan dalam penerapan pasal yang relevan karena kondisi faktual yang kompleks, faktor aparat penegak hukum yaitu keterbatasan jumlah penyidik dan waktu yang diperlukan untuk menangani kasus secara menyeluruh, faktor sarana dan prasarana, tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polres Lampung Selatan yang menghambat proses pembuktian, faktor masyarakat adanya rasa takut dari masyarakat untuk menjadi saksi karena ancaman

dari pelaku, dan faktor budaya yaitu nilai-nilai lokal yang cenderung menyelesaikan konflik melalui jalur nonformal atau kompromi di luar hukum positif.

Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim, melaksanakan tugas dengan lebih profesional agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laboratorium forensik modern, untuk mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan akurasi pengungkapan bukti. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, terutama dalam melaporkan tindak pidana, memberikan keterangan sebagai saksi secara jujur. Dengan sinergi antara profesionalisme aparat hukum, ketersediaan sarana pendukung, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih optimal. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud secara nyata, tidak hanya sebagai cita-cita tetapi juga sebagai realitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Organ Tunggal.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MURDER IN ORGAN TUNGGAL ENTERTAINMENT (Study at the South Lampung Police Resort)

By
Syukron Ginta Kesuma

The crime of murder in organ tunggal entertainment is a serious violation of the law that requires strict law enforcement by authorities. This study examines cases under Verdict Number: 93/Pid.B/2020/PN Kla, where Defendant I was sentenced to 7 years and 6 months imprisonment, and Defendant II to 2 years and 10 months imprisonment, as well as Verdict Number: 353/Pid.B/2023/PN Kla, where Defendant I was sentenced to 6 years imprisonment, and Defendant II to 1 year and 10 months imprisonment. Both cases proved that the defendants committed murder as stipulated in Article 170 Paragraph (2) point 3 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The main issues addressed in this research are how law enforcement is carried out against perpetrators of murder in organ tunggal entertainment and what factors hinder the law enforcement process.

This research employs a normative juridical and empirical approach. Data collection was conducted through literature reviews and interviews with resource persons, including investigators from the South Lampung Police Resort, prosecutors from the South Lampung District Prosecutor's Office, and judges from the Kalianda Class IB District Court. Data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive overview.

The findings indicate that law enforcement against murder perpetrators in organ tunggal entertainment is conducted within the framework of the criminal justice system. This process includes investigations by the police documented in the Investigation Report (BAP), the preparation of indictments and prosecutions by the prosecutor's office in accordance with Article 170 Paragraph (2) point 3 of the Penal Code, and sentencing by the panel of judges. Factors hindering law enforcement include challenges in applying relevant legal articles due to complex factual conditions. The limited number of investigators and the time needed to handle cases thoroughly also pose significant challenges. The absence of forensic laboratories in the South Lampung Police jurisdiction hinders the evidence verification process, delaying progress. Additionally, public fear of becoming witnesses due to threats from perpetrators makes it difficult to gather reliable testimonies. Local cultural values that favor resolving conflicts through non-formal

or compromise methods outside the formal legal system further complicate the law enforcement process.

The recommendation from this research is that law enforcement officers, such as police investigators, prosecutors, and judges, carry out their duties more professionally so that the law enforcement process runs more effectively. In addition, the government needs to provide adequate facilities and infrastructure, such as modern forensic laboratories, to expedite the investigation process and improve the accuracy of evidence disclosure. Community participation is also very important, especially in reporting crimes and providing honest testimony as witnesses. With the synergy between the professionalism of law enforcement officers, the availability of supporting facilities, and the active participation of the community, it is hoped that a more optimal law enforcement system can be created. Thus, justice can be realized in a tangible way, not only as an ideal but also as a reality in community and national life.

Keywords: Law Enforcement, Murder, Organ Tunggal.